



Strategi Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya Operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun

**Mella Pradita Putri Fernanda¹, Dwi Angeli Agustina²,
Fery Setiawan³**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo ^{1,2,3}

e-mail: mellapradita3@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of management functions in supporting operational efficiency and effectiveness at the National Unity and Politics Agency (Bakesbangpol) of Madiun City. The focus of the study is directed toward the implementation of management functions, including planning, organizing, actuating, and controlling, in office management activities, financial administration management, as well as support for human resource management and organizational coordination. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through direct observation, documentation, and involvement in institutional activities. The results indicate that the implementation of management functions at Bakesbangpol of Madiun City has been relatively well executed and aligned with the principles of public management, particularly in supporting administrative order, improving operational efficiency, and strengthening financial management accountability. The study also identifies several challenges, including budget constraints, specific workload pressures, and the need to enhance human resource capacity. The findings suggest that strengthening operational management plays a crucial role in improving the performance of public sector organizations.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, Operational Resources, Public Management.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun. Fokus kajian diarahkan pada implementasi fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam kegiatan manajemen perkantoran, pengelolaan administrasi keuangan, serta dukungan terhadap manajemen sumber daya manusia dan koordinasi organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi, dan keterlibatan dalam aktivitas kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi manajemen di Bakesbangpol Kota Madiun telah berjalan secara relatif baik dan selaras dengan prinsip-prinsip manajemen publik, khususnya dalam mendukung tertib administrasi, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan anggaran, beban kerja tertentu, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan manajemen operasional berperan penting dalam meningkatkan kinerja organisasi sektor publik.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, Sumber Daya Operasional, Manajemen Publik.

PENDAHULUAN

Kinerja organisasi sektor publik menjadi semakin penting di era desentralisasi seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Peningkatan tuntutan tersebut mendorong lembaga pemerintahan untuk menerapkan strategi manajemen yang mampu menjamin penggunaan sumber daya secara optimal agar tujuan organisasi dapat dicapai tanpa pemborosan. Efisiensi operasional merujuk pada kemampuan organisasi dalam menghasilkan output dengan penggunaan input yang minimal, sedangkan efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan (Gultom et al., 2024). Kedua konsep ini menempatkan efisiensi dan efektivitas sebagai variabel kunci dalam analisis kinerja organisasi sektor publik di berbagai tingkat pemerintahan.

Strategi efisiensi dan efektivitas operasional dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya, termasuk keterbatasan anggaran, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kebutuhan reformasi birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan strategi efisiensi dapat dilakukan melalui penyederhanaan proses kerja, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat layanan, serta pengembangan sistem kerja yang berorientasi pada hasil guna mendukung pencapaian efektivitas organisasi secara menyeluruh (Handini et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efisiensi organisasi dapat ditingkatkan melalui perbaikan prosedur kerja, optimalisasi teknologi informasi, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja agar aktivitas organisasi berjalan lebih optimal (Haditiya et al., 2024). Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan organisasi; keduanya perlu diintegrasikan untuk memastikan pengelolaan sumber daya dan anggaran yang optimal (Yulisfan, 2023).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran strategis yang melampaui fungsi administratif semata. Bakesbangpol bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan, pengelolaan potensi konflik sosial, serta koordinasi stabilitas politik di wilayahnya (Marpaung & Irfan, 2023). Kompleksitas tugas tersebut menuntut adanya pengelolaan operasional yang efisien dan efektif agar program kerja yang dirancang dapat dilaksanakan secara optimal serta memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penerapan strategi efisiensi dan efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya manusia, perbaikan proses administratif, serta integrasi teknologi informasi dalam mendukung operasional organisasi (Ariati et al., 2025). Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kecepatan layanan, akurasi data, dan kualitas pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan daerah

(Satriawati et al., 2025). Selain itu, penerapan prinsip agile governance atau tata kelola yang gesit terbukti mampu meningkatkan responsivitas organisasi publik terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta mempercepat penyampaian layanan yang efisien dan adaptif (Kristina et al., 2024). Masih terdapat berbagai hambatan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas di sektor publik, seperti birokrasi yang kaku, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perencanaan anggaran yang belum optimal (Abdurahman, 2025). Hambatan-hambatan tersebut berpotensi menghambat upaya instansi pemerintah dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya operasional sehingga strategi yang dirancang belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis penerapan strategi efisiensi dan efektivitas sumber daya operasional di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun. Fokus kajian meliputi evaluasi langkah-langkah strategis yang diterapkan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi pengembangan manajemen operasional di lingkungan pemerintahan daerah yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen dan Kinerja Organisasi Sektor Publik

Manajemen dalam organisasi sektor publik berperan penting dalam memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Menurut Robbins dan Coulter (2018), manajemen mencakup serangkaian fungsi utama yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks sektor publik, fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian output, tetapi juga pada akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Oleh karena itu, kinerja organisasi publik sangat ditentukan oleh sejauh mana fungsi manajemen diterapkan secara konsisten dan terintegrasi.

Efisiensi dan Efektivitas dalam Pelayanan Publik

Efisiensi dan efektivitas merupakan dua indikator utama dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Efisiensi merujuk pada kemampuan organisasi dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output tertentu, sedangkan efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Mahmudi, 2019). Dwiyanto (2017) menegaskan bahwa organisasi publik yang efisien belum tentu efektif, sehingga kedua konsep tersebut harus diintegrasikan dalam praktik manajemen publik agar pelayanan yang diberikan tidak hanya hemat sumber daya, tetapi juga tepat sasaran. Dalam praktik pemerintahan daerah, keterbatasan anggaran dan

meningkatnya tuntutan masyarakat menjadikan efisiensi dan efektivitas sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan sumber daya operasional. Organisasi publik dituntut untuk mampu menyusun strategi kerja yang rasional, berbasis kinerja, serta didukung oleh sistem pengawasan dan evaluasi yang memadai (Mardiasmo, 2018).

Manajemen Sumber Daya Operasional

Sumber daya operasional dalam organisasi publik meliputi sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Pengelolaan sumber daya operasional yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pembagian tugas yang jelas, serta sistem pengendalian internal yang kuat (Anthony & Govindarajan, 2014). Dalam sektor publik, pengelolaan sumber daya operasional juga harus memperhatikan prinsip akuntabilitas publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan sumber daya operasional sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kurang optimalnya sistem koordinasi antarunit kerja (Osborne, 2010). Peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan koordinasi organisasi menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas operasional.

Efisiensi dan Efektivitas dalam Konteks Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah memiliki karakteristik organisasi yang kompleks karena berhadapan langsung dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Bakesbangpol sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta pencegahan konflik sosial (Marpaung & Irfan, 2023). Kompleksitas tugas tersebut menuntut adanya pengelolaan operasional yang efisien dan efektif agar setiap program kerja dapat dilaksanakan secara optimal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam organisasi pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sutopo & Suryanto, 2019). Namun demikian, tantangan seperti birokrasi yang kaku, keterbatasan anggaran, dan beban kerja aparatur masih menjadi kendala utama dalam implementasi manajemen kinerja di sektor publik (Abdurahman, 2025).

METODE PENELITIAN

Pada konsep metodologi hasil kegiatan penelitian ini penulis menerapkan pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif. Beberapa metode dalam pengumpulan data digunakan dalam penelitian kualitatif, adalah wawancara mendalam, observasi yang terlibat, dan analisis dokumen. Wawancara mendalam memberi kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan perspektif, pengalaman, dan pemahaman yang lebih dalam dari sumber informasi. Observasi yang terlibat memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena secara langsung di lingkungan alami.

Analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan pemahaman mengenai konteks, peraturan, serta informasi tertulis. Adapun kriteria informasi dalam kegiatan penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh para pegawai serta dari data tertulis yang mendukung. Terdapat dua data yang digunakan, yang pertama data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai. Yang kedua data sekunder, berupa dokumen dan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi manajemen di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip manajemen sektor publik, khususnya dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC) telah menjadi kerangka kerja utama dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Robbins dan Coulter (2018) yang menegaskan bahwa fungsi manajemen merupakan fondasi utama dalam pencapaian tujuan organisasi, baik di sektor privat maupun publik.

Perencanaan Operasional dan Keterkaitannya dengan Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan di Bakesbangpol Kota Madiun disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan formal, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta regulasi daerah yang berlaku. Keberadaan dokumen perencanaan tersebut memberikan arah yang jelas terhadap sasaran program, alokasi sumber daya, serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Menurut Mardiasmo (2018), perencanaan yang baik dalam sektor publik berfungsi sebagai instrumen pengendali penggunaan anggaran agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Perencanaan yang terstruktur memungkinkan organisasi menetapkan skala prioritas program sesuai kebutuhan strategis daerah. Temuan ini memperkuat pendapat Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa efisiensi operasional hanya dapat dicapai apabila perencanaan didasarkan pada analisis kebutuhan dan kapasitas organisasi. Dengan demikian, perencanaan di Bakesbangpol Kota Madiun berkontribusi signifikan terhadap pengurangan pemborosan sumber daya serta peningkatan fokus pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan politik daerah.

Pengorganisasian dan Pengelolaan Sumber Daya Operasional

Dalam aspek pengorganisasian, penelitian menemukan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab di Bakesbangpol Kota Madiun telah dilakukan secara jelas dan berjenjang sesuai dengan struktur organisasi. Setiap pegawai memiliki uraian tugas yang spesifik, sehingga meminimalkan tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kerja. Hal ini sejalan dengan teori pengorganisasian yang dikemukakan oleh Daft (2016), yang menekankan bahwa kejelasan struktur organisasi merupakan prasyarat utama bagi efektivitas operasional.

Pengelolaan sumber daya operasional mencakup sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana pendukung. Dari aspek keuangan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program kerja. Prinsip akuntabilitas dan pengendalian internal tercermin dalam penyiapan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan secara sistematis. Anthony dan Govindarajan (2014) menegaskan bahwa sistem pengendalian keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola organisasi sektor publik.

Pelaksanaan Kegiatan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pelaksanaan kegiatan operasional di Bakesbangpol Kota Madiun menunjukkan adanya upaya integrasi teknologi informasi dalam mendukung efisiensi kerja, khususnya pada manajemen administrasi perkantoran. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) berkontribusi pada peningkatan ketertiban administrasi, kecepatan akses dokumen, serta pengurangan risiko kehilangan arsip. Temuan ini mendukung penelitian Dwiyanto (2017) yang menyatakan bahwa digitalisasi administrasi merupakan salah satu strategi penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penggunaan media komunikasi digital juga mempercepat koordinasi internal dan lintas instansi. Osborne (2010) menekankan bahwa organisasi publik modern dituntut untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi, agar mampu memberikan layanan yang responsif dan efektif. Dalam konteks ini, pelaksanaan kegiatan di Bakesbangpol Kota Madiun menunjukkan kecenderungan positif menuju praktik manajemen publik yang lebih modern dan efisien.

Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja

Fungsi pengendalian di Bakesbangpol Kota Madiun diwujudkan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana, sementara evaluasi digunakan untuk menilai capaian kinerja dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Mekanisme ini memungkinkan organisasi melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap strategi dan prosedur

kerja. Menurut Sutopo dan Suryanto (2019), sistem monitoring dan evaluasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam menjaga konsistensi kinerja organisasi sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan telah membantu organisasi dalam menyesuaikan program kerja ketika terjadi keterbatasan anggaran atau peningkatan beban kerja pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi (learning organization).

Tantangan dalam Implementasi Efisiensi dan Efektivitas

Meskipun secara umum penerapan strategi efisiensi dan efektivitas telah berjalan cukup baik, penelitian ini menemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi optimalisasi kinerja organisasi. Keterbatasan anggaran pada kondisi tertentu mengharuskan organisasi melakukan penyesuaian skala prioritas, yang berpotensi mengurangi cakupan program. Selain itu, beban kerja yang meningkat serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi dan kebijakan strategis, menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdurahman (2025) yang menyatakan bahwa birokrasi yang relatif kaku dan keterbatasan kapasitas aparatur masih menjadi kendala utama dalam penerapan efisiensi di sektor publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan kompetensi digital menjadi kebutuhan mendesak.

Implikasi Manajerial dan Penguatan Kinerja Organisasi

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi manajemen yang terintegrasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya operasional di Bakesbangpol Kota Madiun. Penguatan perencanaan berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan. Denhardt dan Denhardt (2015) menegaskan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga dari kemampuannya memberikan nilai publik (public value) bagi masyarakat. Hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya mengenai pentingnya manajemen operasional yang efektif dalam organisasi sektor publik. Implementasi strategi efisiensi dan efektivitas yang konsisten diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik (Bakesbangpol) Kota Madiun telah berjalan secara relatif baik dan berkontribusi positif terhadap efisiensi serta efektivitas operasional organisasi. Perencanaan berbasis dokumen strategis, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi faktor utama dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi sektor publik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan turut meningkatkan ketertiban administrasi, akuntabilitas, serta kecepatan koordinasi internal. Penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, peningkatan beban kerja pada periode tertentu, serta kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi dan kebijakan strategis. Penguatan manajemen operasional yang terintegrasi dan berorientasi pada kinerja menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas Bakesbangpol Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M. (2025) 'Public sector efficiency challenges in local government', *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), pp. 45–58.
- Abdurahman, T. (2025). Hambatan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Di Indonesia : A Systematic Literature Review Tiara Abdurahman, Usman Indonesia : A Systematic Literature Review.
- Anthony, R.N. and Govindarajan, V. (2014) *Management Control Systems*. 13th edn. New York: McGraw-Hill.
- Ariati, N., Pratama, F., Saputra, I., Putri, M. K., & Fajri, S. I. (2025). Strategy to Improve Operational Performance Efficiency through the Implementation of Management Information System. *JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences)*, 10(1), 1–8. <https://doi.org/10.54732/jeeecs.v10i1.1>
- Daft, R.L. (2016) *Organization Theory and Design*. 12th edn. Boston: Cengage Learning.
- Denhardt, J.V. and Denhardt, R.B. (2015) *The New Public Service: Serving, Not Steering*. 4th edn. New York: Routledge.
- Dwiyanto, A. (2017) *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gultom, D. N., Khairina, E., & Salsabila, L. (2024). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas E-Government Dalam Administrasi Publik. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(1), 128–136.

Haditiya, D. M., & Mursyidah, L. (2024). Membuka Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi Kearsipan di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 20.

Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Mengoptimalkan Peran Sektor Publik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada Pengelolaan Keuangan Negara. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(11), 11–20. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v6i11.10231>

Kristina, I. Y., Tamrin, M. H., & Pancasilawan, R. (2024). Enhancing Public Service Efficiency through Agile Governance: A Case Study in Surabaya. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 10(2), 179–189.

Mahmudi (2019) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marpaung, S. K., & Irfan Syaebani, M. . (2023). Agile, Effective And Efficient Organization: How Can The Public Sector Achieve This?. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(11), 2189–2200. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i11.807>

Osborne, S.P. (2010) *The New Public Governance?*. London: Routledge.

Pemerintah Kota Madiun. (2021). Peraturan Walikota Madiun Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun.

Robbins, S.P. and Coulter, M. (2018) *Management*. 14th edn. Harlow: Pearson Education.

Satriawati, A., Khairani, A. P., Sugiantoro, D., Febriansyah, F., & Mokodompit, E. A. (2025). Strategi Peningkatan Kualitas Operasional Melalui Pengembangan Kompetensi SDM.

Sutopo and Suryanto, A. (2019) *Pelayanan Publik dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: LAN RI Press.

Yulisfan. (2023). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Dana Dalam Menganalisis Laporan Keuangan Publik*. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpmasdi>.